

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa studi terdahulu yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Penelitian terdahulu dalam hal ini berfungsi untuk dapat menjadi acuan tambahan yang nantinya akan digunakan pada bab pembahasan yang selanjutnya.

Penelitian yang pertama ditulis oleh Inayatullah, S. (2022). Dengan judul *Women's Education in Afghanistan-Women's Education in Afghanistan: Disparities in Education Under the Taliban affecting Women's Capabilities Development*. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana perang tanpa akhir dan kekacauan politik di Afghanistan telah membuat negara itu tertatih-tatih di ambang kehancuran. Akibatnya, perempuan dan bagian masyarakat yang terpinggirkan lainnya menjadi lebih buruk. Diskriminasi terhadap pendidikan perempuan, di bawah rezim saat ini, sangat umum terjadi. Membatasi akses perempuan ke pendidikan melalui hambatan yang berbeda, sosial, politik, dan fisik, tersebar luas dengan konsekuensi buruk bagi hak asasi manusia negara. Pendidikan perempuan dapat membantu mengubah masyarakat Afghanistan dan memastikan kelangsungan hidup negara sebagai negara-bangsa modern. Pendidikan wanita dapat membantu pengembangan kemampuan wanita Afghanistan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka memainkan peran mereka dalam pembangunan negara.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Kadir, M. Y. A., & Nurhaliza, S. (2023) dengan judul "State Responsibility of Afghanistan Under Taliban Regime". Penelitian ini membahas bagaimana kekhawatiran serius tentang hak-hak perempuan dan siswa perempuan Afghanistan telah dikemukakan sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif untuk menyelidiki perbedaan argumen hukum dalam hukum suksesi internasional dalam hal status Taliban dalam kerangka kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Penelitian ini menegaskan bahwa Taliban adalah pemerintah *de facto* Afghanistan karena Taliban

memiliki kontrol yang efektif dan terintegrasi atas wilayah negara dan tidak ada entitas yang bersaing dengan klaim konstitusional yang kuat. Oleh karena itu, Taliban terikat oleh hukum internasional untuk menjamin perempuan menikmati hak pendidikan yang setara, termasuk akses ke kurikulum. Namun, kerangka kerja CEDAW saat ini, termasuk komite CEDAW belum mampu mengatasi masalah tersebut, karena harus direformasi di masa mendatang.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Bogaert, H. (2022) dengan judul “History repeating itself: the resurgence of the Taliban and the abandonment of Afghan women”. Penelitian ini membahas bagaimana selama dua dekade Amerika Serikat dan sekutunya berperang melawan Taliban di Afghanistan. Setelah penarikan AS dari Afghanistan pada akhir 2021, Taliban sekali lagi mengklaim kekuasaan negara itu. Taliban telah mulai menerapkan pembatasan yang menolak hak asasi perempuan Afghanistan. Artikel ini akan menguraikan pengabaian Taliban terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional, menganalisis ketaatan Taliban terhadap hak asasi manusia sebelum invasi AS pada tahun 2001, ekspresi pasca-penarikan AS oleh Taliban pada tahun 2021, dan pasca-AS. tindakan penarikan pada tahun 2021. Terakhir, artikel ini akan menganalisis berbagai tindakan yang tersedia bagi komunitas internasional untuk melindungi hak asasi manusia Afghanistan. AS dan komunitas internasional harus melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi hak asasi manusia di Afghanistan, karena mereka menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut yang memungkinkan Taliban bertahan dan kembali.

Penelitian yang keempat ditulis oleh Yousufi, F. (2021) dengan judul “The Prospect of Women’s Rights in the Post-Taliban-Government Peace Agreement”. Penelitian ini membahas bagaimana Taliban, yang didukung oleh Pakistan, muncul di Afghanistan pada tahun 1994, mengumumkan pendirian Imarah Islam Afghanistan. Awalnya muncul sebagai penyelamat Afghanistan, mereka mengecewakan warga Afghanistan dengan memperkenalkan versi dan pemahaman Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membatasi pergerakan perempuan di depan umum, melarang pendidikan dan bekerja di luar rumah. Dituduh menyembunyikan pemimpin Al Qaeda, rezim Taliban digulingkan oleh

AS pada Oktober 2001; mereka bangkit kembali dan memulai serangan pemberontakan terhadap pasukan asing dan pemerintah setelah tahun 2003. Posisi mereka terhadap pendidikan perempuan dan pekerjaan di luar rumah penuh dengan pasang surut sejak saat itu. Awalnya, pada tahun 2006, Taliban menginstruksikan para pejuangnya untuk menyerang lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah, terutama perempuan; Sekitar 2010-2012, posisi mereka melunak, memungkinkan siswa perempuan menempuh pendidikan dan perempuan bekerja sebagai guru dan dokter. Namun, modifikasi yang diklaim ini disertai dengan aturan yang sulit dipenuhi yang terus merampas pendidikan dan pekerjaan perempuan di luar rumah. Banyak penelitian mendalilkan bahwa posisi Taliban telah berubah mengenai pendidikan perempuan dan bekerja di luar rumah, namun, perilaku pejuang Taliban di medan pertempuran dan tindakan kepemimpinan mereka dalam pembicaraan damai mengatakan sebaliknya. Perubahan dalam kebijakan Taliban tampak nominal, menipu, dan taktis, hanya untuk menarik perhatian media nasional dan internasional dan menumbuhkan dukungan rakyat untuk kembali berkuasa. Dengan menggunakan data sekunder, artikel ini mengeksplorasi posisi Taliban mengenai hak-hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan, untuk menentukan apakah, bagaimana, mengapa, dan sejauh mana posisi Taliban telah berubah dalam hal ini dan mengkaji prospek hak-hak perempuan di Afghanistan jika saat ini. pembicaraan damai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan membuahkan hasil. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi disarankan untuk memastikan suara perempuan didengar dan kemungkinan kesepakatan damai tersebut responsif gender.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Jan, A., Hassan, M., Kamboyo, S. H., & Ramzan, M. (2022) dengan judul “Implications and Prospects of Taliban’s Rule on Afghan Women in Afghanistan in the post US withdrawal period”. Penelitian ini membahas bagaimana adanya fakta bahwa tepat setelah penarikan AS dari Afghanistan, lingkungan ketakutan dan ketidakpastian terjadi di antara wanita Afghanistan yang pada akhirnya mengurung wanita tersebut di rumah mereka atau memaksa mereka melarikan diri dari Afghanistan. Di sisi lain, rezim baru Taliban menyatakan secara terbuka untuk menjamin hak-hak perempuan dan akan

memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik, sosial, pendidikan dan ekonomi; namun, pemerintahan Taliban di masa lalu adalah kenangan tertentu yang tidak memungkinkan mereka untuk diyakinkan. Koran itu juga menemukan bahwa demi penghargaan pengakuan dari komunitas internasional, Taliban terpaksa berada di posisi paling belakang. Tetap saja komunitas internasional begitu waspada dalam memberikan pengakuan kepada rezim Taliban.

Kelima penelitian yang telah dilakukan di atas ini memiliki korelasi yang masing-masing memiliki hubungan dengan seluruh variabel x dan juga y yang ada di dalam judul yang diangkat penulis. Dalam penelitian yang pertama, kedua, dan juga keempat, pembahasan yang dilakukan ini fokus kepada bagaimana regulasi yang diberikan oleh Taliban sangat menghalangi gerak dari wanita dalam hal pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sedangkan dalam penelitian ketiga, pembahasan dilakukan dalam melihat bagaimana sudut pandang yang dimiliki oleh Taliban kepada wanita yang menjadi pengikutnya secara umum, bagaimana aturan mereka diperlakukan secara seharusnya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penelitian yang kelima memiliki kesamaan dengan penelitian pertama, kedua, dan keempat, hanya saja penelitian yang kelima lebih fokus kepada bagaimana dampak tambahan dari kawasan ini di mata Amerika Serikat.

Berdasarkan dari tinjauan literatur yang telah dijelaskan di atas, persamaan antara riset-riset di atas dengan riset yang dilakukan penulis ini berkaitan dengan bagaimana keseluruhan riset di atas sama-sama membahas mengenai konflik Taliban dan juga konflik hak perempuan yang ditindas. Namun, novelty atau kebaruan yang digunakan dalam riset ini di satu sisi berkaitan dengan bagaimana penulis menggunakan alat analisis SDGS dari PBB, yang sejauh ini belum dilakukan riset lain.

Berdasarkan dari tinjauan literatur yang telah dijelaskan di atas, persamaan antara riset-riset di atas dengan riset yang dilakukan penulis ini berkaitan dengan bagaimana keseluruhan riset di atas sama-sama membahas mengenai konflik Taliban dan juga konflik hak perempuan yang ditindas. Namun, novelty atau kebaruan yang digunakan dalam riset ini di satu sisi berkaitan dengan bagaimana

penulis menggunakan alat analisis SDGS dari PBB, yang sejauh ini belum dilakukan riset lain.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Hak Perempuan Dalam Pendidikan**

Hak perempuan dalam pendidikan adalah hak-hak yang diberikan kepada perempuan untuk mengakses, berpartisipasi, dan mendapatkan pendidikan yang setara dengan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Pendidikan yang setara dan inklusif penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa hak penting yang melibatkan perempuan dalam pendidikan (Bogaert, 2022):

1. Akses yang setara: Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan pada semua tingkatan dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses ke pendidikan berdasarkan jenis kelamin
2. Tanpa diskriminasi: Perempuan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam hal penerimaan, penempatan, atau proses pembelajaran di institusi pendidikan. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek pendidikan
3. Keamanan dan perlindungan: Perempuan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau penyalahgunaan baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan. Institusi pendidikan harus menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan
4. Kualitas pendidikan: Perempuan memiliki hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas tinggi dan relevan. Kurikulum harus bebas dari stereotip gender dan harus mencakup isu-isu yang relevan dengan kehidupan perempuan
5. Kesetaraan dalam peluang: Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kepemimpinan, olahraga, dan pengembangan keterampilan. Tidak boleh

ada batasan atau stereotip yang menghalangi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan tersebut

6. Pendidikan seksual yang komprehensif: Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis fakta. Pendidikan seksual harus mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, hak reproduksi, perlindungan dari kekerasan seksual, dan pentingnya hubungan yang sehat dan setara
7. Kesempatan setelah pendidikan: Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan lanjutan, pelatihan, dan pengembangan karier. Mereka harus memiliki akses ke pekerjaan yang setara dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara penuh dalam kehidupan profesional dan ekonomi.

Pentingnya memastikan hak-hak perempuan dalam pendidikan adalah untuk memastikan kesetaraan gender, memerangi stereotip dan diskriminasi, serta mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi.

### **2.2.2 Regulasi Pendidikan Bagi Perempuan**

Pendidikan bagi perempuan telah menjadi fokus perhatian dalam kerangka regulasi pendidikan di tingkat internasional. Pada tingkat global, munculnya berbagai perjanjian dan konvensi telah memberikan dasar hukum yang mengakui hak pendidikan bagi perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pada tingkat internasional, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi pada tahun 1979, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak pendidikan perempuan. Melalui perspektif hubungan internasional, negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Program-program seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pentingnya mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan

sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Negara-negara diharapkan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung pendidikan perempuan, menciptakan akses yang setara, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Sekaligus, dalam kerangka hubungan internasional, organisasi internasional seperti UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dan UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) turut berperan dalam mempromosikan pendidikan bagi perempuan. Mereka memberikan bantuan teknis dan sumber daya finansial kepada negara-negara untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang mendukung inklusi gender. Selain itu, program-program seperti Girls' Education Initiative bekerja sama dengan negara-negara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi regulasi pendidikan bagi perempuan di tingkat internasional. Beberapa negara masih mengalami kesenjangan gender dalam akses pendidikan, terutama di tingkat sekolah menengah dan tinggi. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, peran tradisional gender, dan ketidaksetaraan sosial masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Melalui diplomasi pendidikan, negara-negara bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perempuan (Sumitra & Rokba, 2023).

Pendidikan bagi perempuan juga diakui dalam konteks ekonomi global. Perempuan yang terdidik memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan nasional. Regulasi pendidikan bagi perempuan juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks konflik dan krisis kemanusiaan, pendidikan perempuan menjadi semakin penting. Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang menegaskan pentingnya memastikan bahwa pendidikan perempuan tetap berlanjut bahkan dalam situasi konflik. Organisasi kemanusiaan internasional, seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), bekerja untuk memberikan akses pendidikan yang aman bagi perempuan yang terkena dampak konflik dan pengungsi. Dalam era globalisasi, regulasi pendidikan bagi perempuan

juga mencakup aspek teknologi dan keterampilan digital. Program-program internasional berfokus pada meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mereka dapat bersaing dalam pasar kerja global yang semakin terhubung. Regulasi pendidikan bagi perempuan dalam perspektif hubungan internasional mencerminkan komitmen global untuk mencapai kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi (Kadir & Nurhaliza, 2023).

### **2.2.3 Diskriminasi Gender dan Pendidikan di Afghanistan**

Dalam hal diskriminasi gender dalam pendidikan, Afghanistan tidak berbeda dengan negara-negara yang paling tidak berkembang. Namun, tidak seperti kebanyakan negara terbelakang, Afghanistan sangat menderita karena mengalami berbagai perang, pendudukan, dan perang saudara. Sebagai akibat dari pergolakan geo-politik yang sangat besar ini, Afghanistan secara global terdegradasi ke posisi terbawah dari semua indikator sosial-ekonomi. Diskriminasi gender dalam pendidikan cukup meluas. Jauh dari contoh terisolasi dari diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan, negara tampaknya memiliki kebijakan untuk memastikan akses perempuan ke pendidikan diblokir. Untuk memahami situasi Afghanistan terkait pendidikan perempuan atau kekurangannya, kita perlu menyelidiki situasi pendidikan perempuan di negara tersebut dari tiga era terakhir: Taliban, Pasca-Taliban, dan lagi-lagi Taliban. Demikian pula, hambatan pendidikan perempuan di Afghanistan secara luas terbagi dalam dua bidang. Yang pertama adalah hambatan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Yang lainnya adalah hambatan kelangsungan hidup ekonomi yang berbeda dengan ekonomi yang miskin dan dilanda perang. Taliban pada 1990-an, tugas pertama mereka dalam pemerintahan, datang dengan pola pikir yang lebih kaku dan transformatif. Dalam pencarian mereka untuk mencapai bentuk pemerintahan yang lebih puritan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, fokus utama mereka pada pendidikan lebih condong ke agama. Pendidikan duniawi seperti yang kita lihat, kemudian, bukanlah permulaan. Banyak dari pernyataan kebijakan mereka pada saat itu memandang

pendidikan sebagai alat untuk 'mengubah masyarakat' dalam model umat pada zaman nabi. Terlepas dari kecenderungan sempit itu, Taliban tidak memiliki sarana maupun kemampuan untuk merestrukturisasi sektor pendidikan (Hassani, 2023).

Akses perempuan ke pendidikan pada saat itu terhambat karena kurangnya sumber daya dan ketidakmampuan mereka untuk menyediakan lembaga pendidikan terpisah bagi penduduk perempuan. Namun, larangan pendidikan perempuan tidak seragam di seluruh Afghanistan dengan perbedaan yang ada di seluruh negeri. Dalam satu contoh, Komite Swedia untuk Afghanistan dilaporkan mendidik 13.000 perempuan pada tahun 1997 di bagian pedesaan negara itu. Afghanistan pada dasarnya adalah masyarakat kesukuan dengan norma sosial yang kaku. Sementara pemerintah saat itu dan kebijakan mereka terhadap pendidikan perempuan memiliki arti yang sangat penting, kita perlu memahami faktor menyeluruh yang melampaui segala bentuk pemerintahan dan administrasi. Gagasan budaya tentang pendidikan yang 'berbahaya dan tidak berguna bagi perempuan dan stigmatisasi berikutnya yang berasal dari gagasan ini sangat mengecilkan hati dan mendemotivasi perempuan dari pendidikan bahkan tanpa adanya kebijakan koersif administratif terhadap pendidikan perempuan. Gagasan beracun ini mengambil bentuk yang sama sekali baru ketika diperkuat oleh kebijakan pemerintahan yang lebih primitif dan regresif yang berkuasa, suatu prestasi yang sering diulang setiap beberapa dekade dalam kasus Afghanistan (Inayatullah, 2022).

#### **2.2.4 Sustainable Development Goal 4**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 memiliki 10 target yang mencakup berbagai aspek pendidikan. Ada tujuh target yang merupakan hasil yang diharapkan dan tiga target yang merupakan sarana untuk mencapai target tersebut. Tujuh Target Hasil yang ada di dalamnya ialah (United Nations, 2022):

1. Pendidikan dasar dan menengah universal. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua siswa perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif
2. Pengembangan siswa dan pendidikan pra-dasar universal. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua siswa perempuan dan laki-laki memiliki akses ke

pengembangan, pengasuhan, dan pendidikan siswa yang berkualitas sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar

3. Akses yang sama terhadap pendidikan teknik/kejuruan dan pendidikan tinggi. Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas
4. Keterampilan yang relevan untuk pekerjaan yang layak. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan
5. Kesetaraan dan inklusi gender. Pada tahun 2030, menghapus disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan siswa dalam situasi rentan
6. Literasi remaja universal. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua kaum muda dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai literasi dan numerasi
7. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan anti kekerasan, global kewarganegaraan dan apresiasi keragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena akses pendidikan perempuan di bawah kepemimpinan Taliban di Afghanistan dalam konteks prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai Islam, dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana batasan tersebut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana pembatasan tersebut sesuai dengan konsep-konsep yang tercakup dalam Sustainable Development Goals (SDGs), terutama Goal 4 yang menekankan pentingnya pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua individu. Berdasarkan dari hasil pemaparan yang sudah dilakukan, maka asumsi penelitian penulis dalam riset ini adalah:

*“Pelarangan sementara perempuan untuk mengakses pendidikan di luar rumah oleh pemerintah Taliban di Afghanistan, dengan penekanan pada penyelarasan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mungkin tidak sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, terutama dalam konteks Tujuan Nomor 4 yang menekankan pentingnya pendidikan merata untuk semua orang.”*

## 2.4 Kerangka Analisis

Berdasarkan dari kerangka konseptual yang telah disusun di atas, maka skema dan alur penelitian yang timbul ialah:

